



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DAIRI

Jalan Merdeka No.4A Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara 22211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dairi Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Dokumen Renja DLH Kabupaten Dairi Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026, serta mempertimbangkan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum dapat memenuhi harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rancangan Akhir Renja DLH Kabupaten Dairi Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan Kabupaten Dairi yang ramah lingkungan.

Sidikalang, September 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DAIRI,



SAUT MARULI TUA SINAGA, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19730625 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	9
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	10
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.4.Penelaahan Usulan Program	12
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	14
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	18
3.3.Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Pengertian Ringkas tentang Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi yang mengacu kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan atau disingkat Renja Dinas LH merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1)Persiapan penyusunan Renja, (2)Penyusunan rancangan Renja, (3)Pelaksanaan forum OPD, (4)dan Penetapan Renja. Renja Dinas LH tahun 2026 sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrebang Kabupaten Dairi dengan tetap mengacu pada Renstra. Selanjutnya Renja Dinas LH tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi serta menjadi dasar estimasi terhadap

penganggaran yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas LH Kabupaten Dairi Tahun 2026.

1.2.LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6).

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja 2026 Dinas LH Kabupaten Dairi ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 untuk memperbaiki tolak ukur sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian Renja Dinas Lingkungan Hidup menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja 2026 ini adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

Bab ini berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan DLH, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH, dan Review Terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja DLH serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH

Bab ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan DLH.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi menerima Anggaran dari APBD Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar Rp.14.710.623.587,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.480.390.051,-.

Belanja Langsung ini dialokasikan untuk 6 (enam) Program kerja antara lain

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Pengelolaan Persampahan

Besarnya anggaran dan realisasi anggaran untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Tahun 2024				
No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan	607,000,000	631.202.000	103.98
B	Belanja Langsung			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	➤ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.646.837.528	2.412.653.784	91.15
	➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.050.000 28.539.274 23.976.400	10.050.000 28.539.274 16.842.400	100 100 100

	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.500.000	12.500.000	100
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	263.540.000	262.966.619	99.78
	➤ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.588.400	49.350.000	100
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	7.500.000	7.500.000	100
	➤ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.015.350	86.15
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.000.000	81.936.720	83.61
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.663.112.750	2.655.628.562	99.72
	➤ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	869.863.354	838.252.889	96.37
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000	9.940.000	100
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.833.500	99.82
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	-	5.500.000	0
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
	➤ Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kab/Kota			
	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	245.125.000	98.05
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
	➤ Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			
	- Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada	3.750.846.000	180.283.250	4.81

	Masyarakat			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi 	860.810.415	721.184.415	83.78
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	200.751.498	196.004.220	97.64
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk M			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah/kab <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan 	186.427.000	169.704.000	91.03
	Program Pengelolaan Persampahan			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 	2.679.340.968	2.489.080.068	92.90

Perbandingan pencapaian renstra tahun 2019-2025, pelaksanaan dan pencapaian renja sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2026 mendukung pelaksanaan tujuan RPD Kabupaten Dairi untuk mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam pencapaian pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah pada tahun 2026 target indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks kualitas air (IKA)
- b. Indeks kualitas Udara (IKU)
- c. Indeks kualitas lahan (IKL)
- d. Predikat AKIP

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mengacu pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana tertuang bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mengemban tugas membantu Bupati Dairi dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi tahun 2025 s/d 2026. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian tujuan RPD Kabupaten Dairi menjadi fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian tujuan RPD

Kabupaten Dairi yaitu “mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan mendukung pencapaian sasaran RPD Kabupaten Dairi yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran RPD tersebut maka yang menjadi tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi dalam urusan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi sebagaimana tertuang dalam RPD secara umum meliputi:

- a. Pengawasan lingkungan, konservasi lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. Penanganan lahan kritis;
- c. Pengelolaan persampahan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam RPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Daerah. Hal tersebut menjadi fokus penanganan dan dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2026.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dituangkan melalui program dan kegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2026 bidang urusan pemerintah daerah pada Program dan Kegiatan pada RKPD Kabupaten Dairi 2026 yang ditampung meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Program Pengelolaan Persampahan.

Program tersebut diatas pada Rencana Kerja Tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan dan ada yang tetap berkelanjutan pada Renja tahun 2026.

Review terhadap RKPD 2026 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3. Pada tabel tersebut disajikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Untuk menyusun RKPD pemerintah daerah wajib melaksanakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang .

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top-down dengan bottom- up, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan

pemerintah daerah dan non government stakeholders untuk pembangunan daerah antara kebutuhan program dan pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 yang merupakan acuan penyusunan Renja, telah dilakukan forum Musrenbang secara berjenjang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kabupaten Dairi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Dairi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sasaran utama RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi Gas rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

8 (delapan) Agenda pembangunan RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah :

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Arah pembangunan pada RPJPN Tahun 2025 – 2045 adalah :

1. Misi 1. Transformasi sosial : (a) Kesehatan untuk semua; (b) Pendidikan berkualitas yang merata, (c) Perlindungan sosial yang adaptif.
2. Misi 2. Transformasi ekonomi : (a) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (b) Penerapan ekonomi hijau; (c) Transformasi digital; (d) Integrasi ekonomi domestik dan global; (e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Misi 3. Transformasi tata kelola : (a) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Misi 4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia : (a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial; (b) Stabilitas ekonomi makro; (c) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Misi 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi : (a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju; (b) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; (c) Lingkungan hidup berkualitas; (d) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; (e) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
6. Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
7. Misi 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Melihat kepada arah pembangunan Nasional di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendukung urusan lingkungan hidup dan kehutanan terintegrasi ke dalam Misi 5, yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan indikator sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup berkualitas, melalui :
 - a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan : (i) Perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan; (ii) Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu – hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; (iii) Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi; (iv) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; (v) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan; (vi) Pengelolaan lahan secara berkelanjutan; (vii) Peningkatan rekayasa lingkungan dan pengendalian hewan penular penyakit; (viii) Penguatan pencegahan kegiatan illegal dari penggunaan sumber daya alam (*logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping*); (ix) Implementasi pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk implementasi sistem peringatan dini kualitas air dan udara; serta (x) Penerapan *polluter pays principle* sebagai instrumen untuk menghitung nilai dari kerusakan lingkungan dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan kepada pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - b. Perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan, dengan arah kebijakan : (i) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan dari sumber, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan, dan penerapan teknologi tepay guna pada Tempat

- Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; (ii) Peningkatan upaya konservasi tanah dan air; (iii) Pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air; serta (iv) Pembangunan sistem peringatan dini kualitas air dan udara.
- c. Penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, dengan arah kebijakan : (i) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal dan kekhasan ekosistemnya; (ii) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan dan daratan setidaknya 30% dari total luas wilayah sesuai komitmen global; serta (iii) Pengembangan pembiayaan inovatif untuk pengelolaan kawasan konservasi.
 - d. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan Indonesia, dengan arah kebijakan : (i) Peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui eksplorasi, ekstraksi dan penapisan keanekaragaman hayati (bioprospeksi) di tingkat genetik dan spesies; (ii) Pengembangan dan pengelolaan digital *sequence information* sumber daya genetik; (iii) Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem seperti wisata alam, air, karbon dan panas bumi; serta (iv) Penerapan prinsip inklusif dan berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk melindungi dan menghormati kearifan lokal dan kedaulatan negara.
2. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui :
- a. Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, dengan arah kebijakan : (i) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan bakau, serta penerapan *zero forest land – fires*; (ii) Penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, termasuk pengupayaan dekarbonasi sumber energi; (iii) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv) Pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (v) Pengembangan industri hijau; (vi)

Dukungan insentif fiskal dan pajak karbon; (vii) Pembangunan bangunan gedung dan hunian yang rendah karbon; dan (viii) Penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim; dengan arah kebijakan : (i) Peningkatan kapasitas pesisir dan sektor kelautan, dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi baik struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat; (ii) Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan; (iii) Peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga ketahanan ekonomi air; dan (iv) Penerapan *climate smart agriculture*, pertanian konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu: meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan meningkatnya penanganan lahan kritis.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Tujuan Perangkat Daerah merupakan dukungan terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah Tahun 2025 – 2026. Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi serta daerah dibidang lingkungan hidup maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi adalah **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Dairi. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi adalah :

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
2. Meningkatnya penanganan lahan kritis;

Secara lebih detail, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2026**

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) (poin)	Poin	78,24
		1. Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Indeks	74,81
		2. Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Indeks	83,99
		3. Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	Indeks	68,15
		4. Penurunan emisi Gas Rumah kaca (GRK)	Penurunan intensitas emisi GRK	Ton CO2 eq	152.265,50
		5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Poin	0,566
		6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	80,00

**Tabel 3.2 Metode Perhitungan Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi**

No	IKU OPD Tahun 2024-2026	Formula / Rumus
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)
1.a	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP = \sqrt{\frac{\{maksimal(X_{1...n}new)\}^2 + \{rata - rata(X_{1...n}new)\}^2}{2}}$ <p>Dimana: IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j, C_i = konsentrasi parameter kualitas air i, L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j, M = maksimum, R = rerata</p>
1.b	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1)\right)$ <p>PU = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂ PU = Indeks Pencemar Udara</p>
1.c	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$ <p>Keterangan : 84,3 : persentase tutupan hutan tertinggi di Papua TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wlayah administratif) SO dan 54.3 : konstanta</p>

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi melaksanakan 8 (Delapan) program, yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
7. Program Pengelolaan Persampahant;
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2026. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian program kegiatan tersebut, sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program, kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatifnya secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran dari masing – masing instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Sebagai salah satu instansi teknis yang menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi menyusun rencana kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang didalam kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi serta pencapaian target kinerja Tahun 2026 sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pelaksanaannya sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan lingkungan Kabupaten Dairi.

Penyusunan rencana kerja tahunan ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi penetapan anggaran untuk tahun dimaksud sehingga fungsi PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi kedepan sebagai salah satu sektor strategis untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Sidikalang, ~~September~~ 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DAIRI,



SAUTE MARULI TUA SINAGA, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19730625 199503 1 001

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Dairi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025	
									I							
									K		Rp					
3	4	4a	5		6		7		8				8		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	%	100	6,951,317,866	43.41	19,881,138,362		4,929,035,218	3.64	15.50	1,234,483,995	5.26	1.50	1,234,483,995		21,115,622,357
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2,665,837,528	80.00	10,919,804,550		2,789,988,218	24	96.00	733,913,968	26.31	6	733,913,968		11,653,718,518
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	25	2,665,837,528	80.00	10,919,804,550	25	2,789,988,218	24	96.00	733,913,968	26.31	6	733,913,968		11,653,718,518
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	580,000,000	48.00	1,652,563,577		92,654,516		0.00	-	0.00	0	-		1,652,563,577
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	45,000,000	48.00	191,332,826	12	18,747,516		0.00	-	-	0.00	-		191,332,826
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	35,000,000	48.00	129,034,950	12	13,197,000		0.00	-	-	0.00	-		129,034,950
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	500,000,000	48.00	1,332,195,801	12	60,710,000		0.00	-	-	0.00	-		1,332,195,801
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	%	100	80,000,000	17.95	941,486,000		34,200,000		0.00	-	-	0.00	-		941,486,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	4	80,000,000	14.00	941,486,000	8	34,200,000	0	0.00	-	-	0.00	-		941,486,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2,759,806,804	100	5,023,127,173		1,227,990,330	1.50	12.50	500,570,027	-	1.50	500,570,027		5,523,697,200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	113,000,000	48.00	228,224,179	12	113,000,000		0.00	-	-	0.00	-		228,224,179
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	2,646,806,804	48.00	4,794,902,994	12	1,114,990,330	3	25.00	500,570,027		3.00	500,570,027		5,295,473,021
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	865,673,534	57.89	1,344,157,062		784,202,154		0.00	-	-	0	-		1,344,157,062
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	36	865,673,534	165.00	1,344,157,062	50	784,202,154		0.00			0.00	-		1,344,157,062
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti	%	100	180,000,000	43.75	1,830,000,800		1,976,346,000		#DIV/0!	-	0.00		-		1,830,000,800
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	%	100	100,000,000	0.00	-		50,500,000		0.00	-	0.00	0.00	-		-
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	dokumen	1	100,000,000	0.00		1	50,500,000								
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	80,000,000	87.50	1,830,000,800		1,925,846,000		0.00	-	0.00	0	-		1,830,000,800

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025	
									I							
									K	%	Rp	%				
3	4	4a	5		6		7		8				8		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	laporan	1	80,000,000	7.00	1,830,000,800	2	1,925,846,000	0.00				0.00	-	1,830,000,800	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola di Kabupaten Dairi	%	100	400,000,000	28.43	1,150,054,530	2	1,925,846,000	#DIV/0!	-	0.00			-	1,150,054,530	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase hasil pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	400,000,000	28.43	1,150,054,530		100,000,000	#DIV/0!	-	0.00	0		-	1,150,054,530	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	1,99	400,000,000	1.99	1,150,054,530		100,000,000	#DIV/0!			0.00		-	1,150,054,530	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/keompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	100	100,000,000	144.00	343,277,000	1.99	100,000,000	0.00	-	0.00			-	343,277,000	
Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	dokumen	1	100,000,000	144.00	343,277,000		180,000,000	0.00	-	0.00	0.00		-	343,277,000	
Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan sekolah adiwiyata	lembaga	50	100,000,000	72.00	343,277,000	50	180,000,000	0.00	-	0.00	0.00		-	343,277,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	%	72	1,850,000,000	108.85	14,112,402,107		1,144,500,000	0.00	-	0.00			-	-	
	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	%	40		0.13											
Pengelolaan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Ton/ tahun	15.022.63	1,850,000,000	16352.82	14,112,402,107	52.698.23	1,144,500,000		-	-	0.00	0.00	-	-	
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	25	1,000,000,000			10	90,000,000							-	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton/ tahun	15.022.63	650,000,000			15,022.63	178,500,000								
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton/ tahun	15.022.63	200,000,000		14,112,402,107	15,022.63	876,000,000								

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Dairi

Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Dairi	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6,144,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Dairi	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8,737,897	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,789,988	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,666,449	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	4,789,988	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	100 orang/bulan	6,666,449	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum Daerah	100%	332,012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	333,151	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	10,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	10,000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	42,012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	43,151	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah paket barang dan cetakan yang disediakan	12 Paket	20,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah paket barang dan cetakan yang disediakan	12 Paket	20,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	10,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	10,000	-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	100,000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	113,439	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	60,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	73,439	-
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	40,000	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	40,000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	117,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	797,258	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	4,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	4,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 laporan	113,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 laporan	139,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	654,258	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	805,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	827,600	-

Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPd 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 unit	785,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 unit	809,860	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	15,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	12,740	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	30 unit	5,000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	30 unit	5,000	-
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Dairi	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100%	650,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Dairi	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100%	762,781	-
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	400,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	512,781	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	80,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	80,000	-
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil GRK	1 Dokumen	100,000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil GRK	1 Dokumen	100,000	-
	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	Dinas Lingkungan Hidup	Data informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	6 Lokasi	120,000	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	Dinas Lingkungan Hidup	Data informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	6 Lokasi	120,000	-
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	100,000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	100,000	-
	Pengambilan contoh uji dan pengujian Parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-	-	Pengambilan contoh uji dan pengujian Parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 paket	112,781	-
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100,000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100,000	-
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Laporan	100,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Laporan	100,000	-
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	100%	150,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	100%	150,000	-

Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPd 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	17 Ha	150,000	Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	17 Ha	150,000	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Dairi	Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100%	250,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Dairi	Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100%	257,344	-
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten Dairi	100%	250,000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten Dairi	100%	257,344	-
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	250,000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	257,344	-
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Dairi	Terwujudnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	50,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Dairi	Terwujudnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	-	-
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	100%	50,000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	100%	-	-
	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah b3 yang dibina		50,000	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah b3 yang dibina		-	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Dairi	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	100,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Dairi	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	100,000	-
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan,	100%	100,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,000	-
	Pengawasan perijinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/kegiatan yang diawasi	25 badan usaha	100,000	Pengawasan perijinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/kegiatan yang diawasi	25 badan usaha	100,000	-
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Dairi	Terwujudnya peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Dairi	Terwujudnya peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	150,000	-
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	150,000	-

Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	150,000	-
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkatnya kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 lembaga	100,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkatnya kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 lembaga	150,000	-
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Dairi	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	72%	966,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Dairi	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	72%	1,159,648	-
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	40%	70,000			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	40%	70,000	
	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah	72%	1,036,000	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah	72%	1,229,648	-
	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 unit	100,000	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 unit	102,669	-
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	683,794	
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	30%	60,000	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	30%	60,000	
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	191,600	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15961,54 ton	876,000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15961,54 ton	191,585	
Total					8,330,000				11,237,670		

Sikalong, 2025
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN DAIRI

SAUT MARULI TUA SIAGA, S.Sos
 PEMBINA TK I

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. DAIRI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						11.237.670.000,00							9.826.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.237.670.000,00							9.826.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						11.237.670.000,00							9.826.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.737.896.550,00						-	6.690.000.000,00	
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar]	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	100	100	100	8.737.896.550,00	-	-	-	-	-	-	6.690.000.000,00	-
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.666.449.402,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	4.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/bulan	6.666.449.402,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-		4.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	333.150.984,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Ber kelanjutan dan Berket ahanan Terhadap Bencana	-	-	345.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	43.150.984,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	113.438.500,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	104.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	73.438.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		62.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	40.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	797.257.664,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	619.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	139.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	654.257.664,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	-	-	-	-	8.737.896.550,00	-	-	-	-	-	-	6.690.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	827.600.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	821.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				50 Unit	809.860.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar]	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	100	100	100	8.737.896.550,00	-	-	-	-	-	-	6.690.000.000,00	-
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				26 Unit	12.740.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30 Unit	5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	762.781.050,00						-	776.000.000,00	
		[Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup]	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	75.61 84.79	69.50 94.30	74.61 83.79	74.81 83.99	762.781.050,00	-	-	-	-	-	-	776.000.000,00	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	512.781.050,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	511.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		81.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)</i>				6 Lokasi	120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			<i>Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>				1 Paket	112.781.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			<i>luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				17 Ha	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	257.344.000,00						-	260.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	Persentase RTH	100	100	100	100	257.344.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000.000,00	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	257.344.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1,99 Ha	257.344.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	0,00						-	55.000.000,00	
		[Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)]	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100	-	100	100	0,00	-	-	-	-	-	-	55.000.000,00	-
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota														
			<i>jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina</i>				20 Usaha	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	100.000.000,00						-	105.000.000,00	
		[Meningkatkan kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100	100	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	105.000.000,00	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				25 Badan Usaha	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	150.000.000,00						-	110.000.000,00	
		[Meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	100	100	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				50 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	1.229.648.400,00						-	1.830.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	17.76	17.70	17.71	17.72	1.229.648.400,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.229.648.400,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.830.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
			<i>Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>				10 Unit	102.669.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			0				- 0	683.794.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
			<i>Persentase luas layanan pengumpulan sampah</i>				30 Persentase	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				- Ton	191.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPStkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				15961,54 Ton	191.585.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		885.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H															9.826.000.000,00	